

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. (2011). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Cetakan Keempat. Malang: Media Nusantara Creative.
- Hamzah, Andi. (2012). *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. (1986) *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. Jakarta: Gramedia.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jilid 5. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S.D, Cassella. (2007). *Asset Forfeiture Law in the United States*. Chapters 1 and 2. New York: Juris Publishing.
- Purwoleksono, Didik Endro. (2019). *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Priyatno, Dwidja. (2004). *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia*. Bandung: CV Utomo.
- Febriansyah, Ferry Irawan dan Prasetyo, Yogi. (2020). *Konsep Keadilan Pancasila*. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press.
- McLeod, Ian. (2003). *Legal Theory*. New York: Palgrave Macmillan.
- Atmadja, I Dewa Gede dan Budiarta, Nyoman Putu. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Bemmelen, J.M Van. (1984). *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Materil Bagian Umum*. Bandung: Binacipta.
- Remmelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arsyad, Jawade Hafidz. (2013). *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bentham, Jeremy. (1907). *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*. New York: Dover Publication. Inc.

- Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2021). *Kajian Hukum: Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*. Jakarta: Kajian Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Jupri dan Rais, Suardi. (2021). *Hukum Pidana Korupsi: Teori, Praktik dan Perkembangannya*. Malang: Setara Press.
- Masyhur, Kahar. (1985). *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia.
- M.D, Moh. Mahfud. (2006). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Public Consultation Paper. (2016). *“Improving Enforcement Options for Serious Corporate Crime: Consideration of a Deferred Prosecution Agreements Scheme in Australia”*. Australia: Australian Government/Attorney-General Department.
- Sprenger, Polly. (2014). *Deferred Prosecution Agreements: The Law and Practice of Negotiated Corporate Criminal Penalties*. United Kingdom: Sweet dan Maxwell.
- Atmasasmita, Romli. (1996). *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta: Putra Abardin.
- Aburaera, Sukarno, Muhadar. dan Maskun. (2013). *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, Topo. (2019). *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harkrisnowo, Harkristuti. (2003). "Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana Di Indonesia". Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Harahap, Yahya M. (2014). *Perubahan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jilid 2. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Salinan Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal dan Makalah

Agustin, Lidya. Lasmadi, Sahuri dan Monita, Yulia. (2024). "Penyelesaian Secara Restoratif Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi". PAMPAS: *Journal Of Criminal Law* Volume 5. No. 3. Doi: 10.22437/pampas.v5i3.37250

Agustina, Shinta. (2016). Roni Saputra. Alex Argo Hernowo. Ariehta Eleison Sembiring. "Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-

- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. Diakses dari <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Slide-Restatement-Pidana.pdf>.
- Febriansyah, Ferry Irawan. (2017). “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa”. DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13. No. 25. hlm. 6. Doi: 10.30996/dih.v13i25.1545.
- Haswandi. (2017). “Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia”. Jurnal Hukum Dan Peradilan Volume 6. No. 1. Doi: 10.25216/jhp.6.1.2017.145-172.
- Hayati, Nur dan Reynaldo, Andrea. (2009). “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Secara Tidak Sukarela Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2257 K/Pid/2006)”. Lex Jurnalica Volume 7. No.1. Doi: 10.47007/lj.v7i1.301.
- Hidayat, Arief. (2019). “Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional”. Seminar. Jakarta.
- Husein, Yunus. (2019). “Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Rangka Tindak Pidana Korupsi”. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Diakses dari https://pusdik.mkri.id/materi/materi_98_Negara%20Hukum%20Berwatak%20Pancasila.pdf.
- Iskandar, Supatmo Eka. (2009). “Prinsip Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata”. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/190550-ID-pengembalian-aset-negara-melalui-gugatan.pdf>.
- JSTOR. (1970). “*The Unconstitutionality of Plea Bargaining*”. Harvard Law Review Volume 7. No. 6. Doi: 10.2307/1339821.
- Kabba, Sandi Herintus, Arjaya, I Made dan Widyantara, I Made Minggu. (2021). “Prosedur Pengembalian Dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Interpretasi Hukum Volume 2. No. 3. Doi: 10.22225/juinhum.2.3.4139.573-579.
- Latif, Abdul. (2016). “Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK”. Jurnal Konstitusi Volume 7. No. 3. Doi: 10.31078/jk732.

- Lengkong, Lonna Yohanes. (2023). "Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Hukum To-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. Volume 9. No. 3. Doi: 10.55809/tora.v9i3.278.
- Makaro, M. Taufik. (2013). "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak". BPHN Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta. Diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf.
- Pandit, I Gde Suranaya. (2016). "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik". *Jurnal Administrasi Publik* Volume 1. No. 1. Doi: 10.22225/pi.1.1.2016.14-20.
- Pratama, Febrian Duta, Pebriansya, Rafly dan Pratama, Mohammad Alvi. (2024). "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles". *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* Volume 1. No. 2. Doi: 10.11111/praxis.xxxxxxx.
- Rihardi, Satrio Ageng. (2019). "*The Strength of Legal Proof in Filing a Civil Lawsuit Against Corruption Actors*". *Law Research Review Quarterly* Volume 5. No. 1. Doi: 10.15294/snh.v5i01.31125.
- Saputra, Refki. (2017). "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia". *Integritas: Jurnal Antikorupsi* Volume 3. No. 1. Doi: 10.32697/integritas.v3i1.158.
- Sawung, Dimas Akbar, Setiyowati, Fariska Jihan dan Yusnika, Mila. (2021). "Paradigma Baru Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP Nasional". *Jurnal Suara Keadilan* Volume 24. No. 1. Doi: 10.24176/sk.v24i1.11268.
- Sudarto dan Purwadi, Hartiwiningsih Hari. (2017). "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Volume 5. No. 1. Doi: 10.20961/hpe.v5i1.18352.
- Sudiran, Florentinus. (2017). "Mencegah Korupsi Di Daerah Dengan Pengawasan Oleh Kejati. *Jurnal Legalitas*" Volume 2. No. 1. Doi: 10.31293/lg.v2i1.2847.
- Susanti, Dwi Siska, Sarah, Nadia dan Hilimi, Nurindah. (2018) "Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan". *Integritas* Volume 5. No. 4. Doi: 10.32697/integritas.v4i2.222.

- Tajudin, I dan Putri, Nella Sumika. (2015). “Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan”. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2. No. 1. Doi: 10.22304/pjih.v2n1.a9.
- Taufik, Muhammad. (2013). “Filsafat Jhon Rawls Tentang Teori Keadilan” Volume 19. No. 1. Diakses dari <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf>.
- Wibowo, Desky. (2017). “Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Legal Opinion* Volume 5. No. 4. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/190550-ID-pengembalian-aset-negara-melalui-gugatan.pdf>.
- Zulfina, Bahreisy, Budi dan Nur, Muhammad. (2024). “Pengembalian Kerugian Negara Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* Volume 7. No. 3. Doi: 10.29103/jimfh.v7i3.16972.

Internet

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.. “Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan”.https://bphn.go.id/data/documents/laphir_lembaga_penyitaan_dan_pengelolaan_barang_hasil_kejahatan.pdf. Diakses pada 15 Desember 2024
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Dialog Perhitungan Kerugian Negara”. <https://gorontalo.bpk.go.id/dialog-perhitungan-kerugian-negara/>. Diakses pada 15 Desember 2024.
- Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Kaur. “Bentuk Pencegahan Korupsi. KPK RI Sosialisasi MCP” <https://kominfo.kaurkab.go.id/berita/detail/bentuk-pencegahan-korupsi-kpk-ri-sosialisasi-mcp>. Diakses pada 27 November 2024.
- Garner, Bryan A. “Black’s Law Dictionary”. <https://irp.cdn-website.com/6b820530/files/uploaded/Blacks%20Law%20Dictionary%207th%20Edition.pdf>. Diakses pada 27 November 2024.
- Jayadi, Hendri. “Bukan Hanya Persolan Hukum. Tapi Persoalan Karakter Mental yang Korup”. *Suara Media Nasional*. 15 Oktober 2022. terdapat dalam: <https://suaramedianasional.co.id/dr-hendri-jayadi-sh-mh-persoalan-korupsi-bukan-hanya-persoalan-hukum-tapi-persoalan-karakter-mental-yang-korup/>. Diakses pada 15 Januari 2025.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>. Diakses pada 27 November 2024.

Oxford Learners Dictionaries. “Korupsi. Dalam Oxford Dictionary”. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/corruption>. Diakses pada 27 November 2024.

Pusat Edukasi Antikorupsi. “Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!”. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>. Diakses pada 04 Maret 2024.

Sahbani, Agus. “Begini Alasan MK Ubah Delik Tipikor”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alasan-mk-ubah-delik-tipikorlt5888f5b5bb039/>. Diakses pada 15 Desember 2024.

Saputra, Eka Yudha. “RUU Perampasan Aset. Lembaga yang Menjadi Pengelola Aset Rampasan Akan Dibahas Bersama DPR”. https://nasional.tempo.co/read/1721200/ruu-perampasan-aset-lembaga-yang-menjadi-pengelola-aset-rampasan-akan-dibahas-bersama-dpr?page_num=2. Diakses pada 15 Desember 2024.

Sustainable Indonesia. “Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. <https://sustain.id/2023/09/14/tindak-pidana-korupsi-menurut-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>. Diakses pada 15 Desember 2024.